



**SALINAN**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 67 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN BOJONGSARI  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dijelaskan Pembentukan, nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran perlu dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN BOJONGSARI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka kelancaran Tugas Pokok UPTD.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Bojongsari dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Unsur Organisasi**

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVa.
- (2) Kasubag TU UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IVb.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi**

**Paragraf 1**

**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran serta tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan rencana kegiatan UPT dibidang Pemadaman kebakaran mengacu kepada Rencana Strategis Dinas;
  - b. menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan Teknis, Pedoman dan Petunjuk Teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dan Landasan Kerja;
  - c. mengumpulkan, mengolah data dan Informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) Bencana lainnya;
  - d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT pemadam kebakaran;
  - e. memberikan Pelayanan Informasi mengenai Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran;
  - f. melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan juru padam dan juru penyelamat (*rescue*);
  - g. menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
  - h. menyiapkan bahan Penetapan Surat Tugas Juru padam;
  - i. mengupayakan peningkatan kualitas pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
  - j. memberikan dukungan bantuan pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya di luar wilayah operasionalnya.
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD dalam Pengelolaan urusan Administrasi Umum, kepegawaian, perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan rencana kegiatan UPTD;
  - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan Tertib Administrasi dan tertib Kerja diseluruh satuan Organisasi dilingkungan UPTD;
  - d. pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh Satuan Organisasi dilingkungan UPTD;
  - e. pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran UPTD dibawah koordinasi Sekretaris Dinas;
  - f. pelaksanaan penyusunan bahan Rencana Anggaran Satuan Kerja UPTD dibawah koordinasi Dinas;
  - g. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemadam Kebaran dan Penyelamatan;
  - h. pelaksanaan penghimpunan dan Inventarisasi Peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - i. pelaksanaan penghimpunan Data sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - k. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala;dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan Tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

##### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 11**

- (1) Hal-hal yang menjadi Tugas Pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD sebagai Pelaksana urusan Pemadaman Kebakaran dan penyelamatan, kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.



- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada Peraturan Pperundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 13**

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Pengawasan Kepegawaian dilingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 21 November 2016  
**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 21 November 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**H. HARRY PRIHANTO**  
**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 67**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**



**N. LIENDA BATNANURDIANNY, SH., M.Hum**  
**NIP. 19700127 199803 2 004**

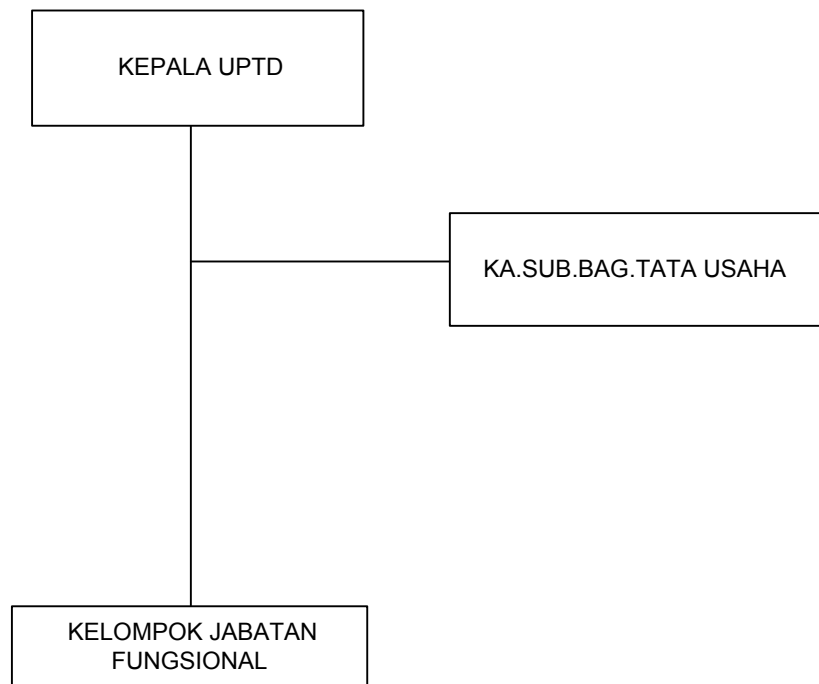
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 67

TAHUN : 2016

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KECAMATAN BOJONGSARI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN  
PENYELAMATAN

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN BOJONGSARI  
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**



**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**